



# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**(STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FATONI HASAN  
NIM. 0810313048**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2015**



## MOTTO

**"Bersyukur dan Hiduplah Dalam Kebaikan Dengan Cara  
Memberikan Yang Terbaik Dalam Hidup dan Cinta"**

**(MARIO TEGUH)**



**Skripsi ini Saya  
Persembahkan Untuk Orang  
Tua Tercinta Ayahanda  
KH. Masrukhin dan Ibunda  
Hj. Maslamatun dan kakak  
Zainul Fuad (Alm) dan adik  
Ulya Lutfiana Tersayang,  
serta Dosen Pembimbing  
yang senantiasa  
mendampingi saya dalam  
menyusun skripsi ini.**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

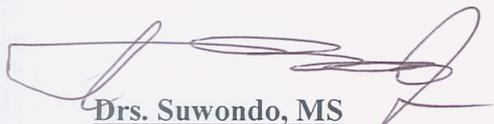
Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 April  
Jam : 11:00 WIB  
Skripsi atas nama : Fatoni Hasan  
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).

Dan dinyatakan lulus

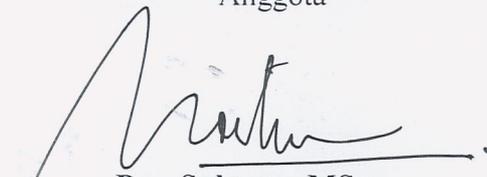
### MAJELIS PENGUJI

Ketua



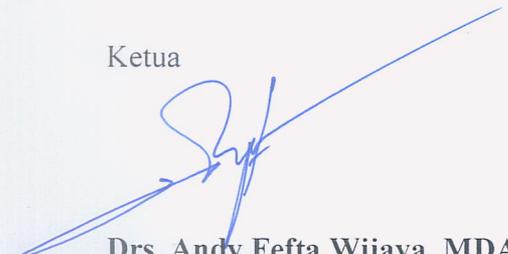
Drs. Suwondo, MS  
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS  
NIP. 19591227 198601 1 001

Ketua



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D  
NIP. 131966869

Anggota



Farida Nurani S.Sos, M,Si  
NIP. 19700721 200501 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 31 Maret 2015



Nama: Fatoni Hasan  
NIM: 0810313048



## RINGKASAN

Fatoni Hasan, 2015. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**, Pembimbing Drs. Suwondo, MS., Drs. Sukanto, MS.

Partisipasi telah lama hanya menjadi slogan semata para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan dan juga tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa. Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur mayoritas belum melaksanakan paradigma baru dari perencanaan pembangunan, dimana dalam perencanaan pembangunan mayoritas belum membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk berpartisipasi, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang.

Metode penelitian pada skripsi ini berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi sehubungan dengan keadaan yang sedang diteliti, dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal terkait dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, bisa dilihat dari Tahap Perencanaan yang mana pada tahap ini Masyarakat Desa Sukorejo terlibat dalam perencanaan melalui forum-forum tingkat RT dan pengajian mingguan, dilihat dari proses pelaksanaan adanya kerelaan masyarakat dalam menyumbang baik dana, materi maupun tenaga dalam pembangunan, maupun bisa dilihat dari keberanian mereka melaporkan ketimpangan-ketimpangan yang itu merupakan bentuk pengawasan. Perwujudan dari Pembangunan Desa Sukorejo tersebut berupa pembangunan Fisik yaitu Pembangunan Pavingisasi Jalan dan Pembangunan saluran Air. Perlunya sikap pro aktif masyarakat Desa Sukorejo secara keseluruhan dalam pembangunan di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro



## SUMMARY

Fatoni Hasan, 2015. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**, Supervisors Drs. Suwondo, MS., Drs. Sukanto, MS.

Participations for along ago only as slogan from government till villages that the development and sustainability of development results will not be successful if not supported by the "public participation". To achieve the success of rural development then all program planning, implementation and evaluation of development should involve the community, because they know the problems and needs in order to build a territory because they are the future that will utilize and assess the success or failure of development in their region. Development planning is a very important instrument. For participatory planning is one of a series of trips also early stages of development and crucial to the success of the development process, especially in the village. Sukorejo is one of the villages in the District of Bojonegoro, East Java Province, the majority has not yet implemented the new paradigm of development planning, where the majority of development planning has not opened the opportunity for all citizens to participate, community participation in the development process is still lacking.

This research method effort seeks to illustrate or describe an event or phenomenon that occurs in connection with the circumstances under study, with a qualitative approach is to determine the factors associated with internal and external Community's Participation in Development Planning in Sukorejo District of Bojonegoro Bojonegoro.

Community participation in development Sukorejo, District of Bojonegoro, Bojonegoro, can be seen from the planning stage which at this stage Society Sukorejo involved in planning through RT-level forums and weekly recitation, seen from the implementation process their willingness to contribute both funds community, material and labor in the construction, and can be seen from their courage disparities reported that a form of supervision. Sukorejo embodiment of Rural Development in the form of physical development that Pavingisasi Construction of Roads and Construction of Water. We need for a proactive stance Sukorejo society as a whole in the development Sukorejo, District of Bojonegoro, Bojonegoro



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya peneliti dapat mengatasi hambatan-hambatan yang harus dilalui sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak luput dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah menyetujui dan mengesahkan skripsi ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik.
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendorong kami agar dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Bapak Drs. Suwondo, MS selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi serta menjadi penerjemah dalam proses adaptasi alat ukur dalam skripsi ini.
4. Kedua orangtua, yaitu Ayahanda tercinta Drs. KH. Masrukhin, M.Si dan Ibunda Hj. Maslamatun, serta adikku Ulya Lutfiana yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan telah mendukung serta memperlancar penulisan skripsi ini.



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang sesuai atas jasa-jasanya yang telah peneliti rasakan manfaatnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan manusia, oleh karena itu di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti membuka diri untuk menerima setiap kritik dan saran yang akan menjadi acuan bagi peneliti di masa datang agar menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan orang lain yang membacanya. Atas perhatiannya, peneliti mengucapkan terima kasih.

Malang, 31 Maret 2015

Peneliti

Fatoni Hasan



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan.....	10
1. Administrasi Publik.....	10
2. Administrasi Pembangunan.....	13
B. Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintah Desa.....	16
1. Pemerintahan Daerah.....	16
2. Desentralisasi.....	18
3. Pemerintah Desa.....	24
C. Partisipasi Masyarakat.....	31
1. Pengertian Partisipasi.....	31
2. Pentingnya Partisipasi.....	33
3. Bentuk-bentuk Partisipasi.....	40
D. Pembangunan Desa.....	41
1. Pengertian Pembangunan Desa.....	41
2. Paradigma Pembangunan Desa.....	42
3. Pembangunan Desa.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Fokus Penelitian.....	62



C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	63
D. Sumber Data .....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
F. Instrumen Penelitian .....	68
G. Analisis Data .....	68

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	71
1. Kabupaten Bojonegoro .....	71
2. Gambaran Umum Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro .....	83
B. Penyajian Data .....	84
1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro .....	85
a. Keterlibatan dalam sumbangan pemikiran .....	85
b. Keterlibatan dalam sumbangan materi, barang dan dana .....	90
c. Pemanfaatan Pembangunan .....	94
d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor) .....	94
e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki .....	95
2. Wujud Pembangunan Desa .....	95
Pembangunan Gorong-gorong Saluran Air (Drainase) .....	96
Pembangunan Pavingisasi Jalan .....	96
C. Pembahasan .....	97
1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro .....	97
a. Keterlibatan dalam sumbangan pemikiran .....	97
b. Keterlibatan dalam sumbangan materi, barang dan dana .....	99
c. Pemanfaatan Pembangunan .....	102
d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor) .....	102
e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki .....	103
2. Wujud Pembangunan Desa .....	104
a. Pembangunan Gorong-gorong Saluran Air (Drainase) .....	105
b. Pembangunan Pavingisasi Jalan .....	105

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	108
-----------------------------	-----





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif ..... 70

Gambar 4.1 Wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo,  
Kecamatan Bojonegoro ..... 85

Gambar 4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo,  
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ..... 87

Gambar 4.3 Wawancara dengan Ibu Hj. Maslamatun ..... 88

Gambar 4.4 Forum Rembug Warga dalam Rangka Partisipasi dalam  
Pembangunan Desa ..... 89

Gambar 4.5 Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Sukorejo,  
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro  
Tentang APBDes ..... 91

Gambar 4.6 Wawancara dengan Ulfa Lutfiana ..... 92

Gambar 4.7 Pembangunan Gorong-gorong (saluran Air) ..... 96

Gambar 4.8 Pembangunan Jalan Setapak (Pavingisasi) ..... 97





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar.

Partisipasi telah lama menjadi penghias bibir, tidak pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan



kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri.

Pada era demokratisasi sebagaimana tengah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu atau golongan.

Terlalu besarnya dominasi negara selama ini yang menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintahan daerah terlebih dalam pemerintahan desa. Proses perencanaan, pengambilan keputusan dan program pembangunan kerap kali dilakukan dengan sistem dari atas kebawah (*top-down*). Rencana program-program pembangunan diseragamkan dibuat ditingkat pusat (atas) dan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, sedangkan potensi setiap daerah berbeda-beda.

Sistem perencanaan pembangunan *top-down* yang bersifat sentralistik ini menyebabkan mandulnya partisipasi masyarakat. sejauh ini, partisipasi



masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004, pemerintah meletakkan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari pemetaan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta profesional masyarakat dan pemerintah daerah dari sejak awal tahap perencanaan sampai pemanfaatan dan pelestarian. Lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. Dimana dominasi negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.



Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Di desa telah dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legeslatif desa. Masyarakat desa baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari Pemerintahan Desa karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab



penyelenggaraan Desa tidak saja ditangan Kepala Desa, BPD dan Aparat Desa tetapi juga ditangan masyarakat desa itu sendiri.

Masyarakat sebagai obyek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mensinergikan antara keinginan penguasa dengan keinginan rakyat, yang mana pada dasarnya partisipasi masyarakat timbul tidaklah semata-mata dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mampu mempengaruhinya, sehingga masyarakat merasa sadar dan terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam segala aspek kehidupan negara.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan dan juga tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa. Pada fase ini sudah selayaknya pembangunan di desa merupakan hasil dari musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh.

Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur mayoritas belum melaksanakan paradigma baru dari perencanaan pembangunan, dimana dalam perencanaan pembangunan mayoritas belum membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk berpartisipasi, partisipasi masyarakat dalam proses



pembangunan masih kurang. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih terbelang belum sepenuhnya terlaksana, sehingga dalam perencanaan pembangunan masyarakat kecenderungan apatis / enggan melibatkan diri, masyarakat lebih tertarik kepada masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan makan, tempat tinggal dan lain-lain, sementara keterlibatan dalam hal-hal politik dan pemerintahan masih belum terbangun dari masyarakat desa. Maka Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimanakah perwujudan dari Pembangunan Desa tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk Mengetahui perwujudan dari Pembangunan Desa tersebut?

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Disamping tujuan yang ingin dicapai maka suatu penelitian harus memiliki kontribusi yang jelas. Adapun kontribusi penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan khasanah ilmiah dan kepastakaan baru dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.

Sebagai bahan refrensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkenan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori atau temuan ilmiah dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun teori yang digunakan adalah Teori tentang Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.



## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian hasil dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal secara garis besar, sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

##### 1. Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin: *Ad* itu *intensif* dan *ministrare* itu melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut *Pasolong (2007:10)* Pengertian Administrasi dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu:

- 1) Administrasi dalam arti *institutionil*, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Administrasi dalam arti *fungsiional*, adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk juga didalamnya tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang.
- 3) Administrasi sebagai proses, sebagai proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari



penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.

Selanjutnya menurut Pasolong (2007:3) Pengertian Administrasi adalah:

“Administrasi adalah suatu pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, frasional”. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Istilah publik berasal dari bahasa inggris Yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Apabila *public administration* diterjemahkan sebagai administrasi negara, maka kecenderungan pelayanan dan penyelenggaraan roda pemerintah akan bermotivasi serba negara. Arti dari *public* itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Moleong, 1999:18).

Administrasi publik itu merupakan proses dimana sumber daya dan personel pulik diorganisir dan dikondisikan untuk memformulasikan, mengimplemetasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Pasolong (2007:15) mendefinisikan “administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”.



Adapun definisi administrasi publik, menurut Syafii (1999:25) adalah:

1. *Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.*

2. *Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments.*

3. *In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills techniques large number of people.*

Jadi menurut Syafii antara lain sebagai berikut:

1) Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

2) Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

3) Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.



Berdasarkan penjabaran mengenai definisi administrasi publik bahwa disimpulkan bahwa sebuah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan secara kerjasama dalam mencapai tujuan.

## 2. Administrasi Pembangunan

Kristiadi (1994) memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adalah "Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian". Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Siagian (2014), merumuskan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

**"Administrasi Pembangunan** adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan "

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

*Pertama*, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration (pembangunan administrasi)*; yang



kemudian lebih dikenal dengan istilah “*Administrative Reform*” (*reformasi administrasi*).

*Kedua*, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development* (*Administrasi untuk pembangunan*). Administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

*Ketiga*, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Menurut Bintoro (1995) bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai ciri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara. Beberapa ciri-ciri perbedaan tersebut dapat dilihat dari dalam uraian dibawah ini sebagai berikut :

Ciri-ciri Administrasi Negara	Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
1. Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju.	1. Lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda terutama bagi lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang.



<p>2. Terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tapi masih kurang ditekankan. Bahkan ada bersikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan.</p>	<p>2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, perekonomian dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.</p>
<p>3. Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib / efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada waktu ini. Berorientasi masa kini.</p>	<p>4. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan. Berorientasi masa depan.</p>
<p>3. Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat (<i>public service</i>) dan tertib Pemerintahan. Administrasi Negara lebih bersikap sebagai "<i>Balancing Agen</i>" (Pelayanan umum)</p>	<p>5. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (<i>Development Functions</i>) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Administrasi Pembangunan lebih bersikap "<i>Developmen Agent</i>" (Penggerak Pembangunan).</p>
<p>4. Sebagai akibat dari hal yang disebutkan diatas, maka Administrasi Negara lebih menengok kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri</p>	<p>6. Administrasi harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan tujuan-tujuan yaitu ekonomi, sosial. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.</p>



5. Dalam Administrasi Negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrasi dalam aparatur pemerintah sekedar sebagai pelaksana.	7. Dalam Administrasi Pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan ( <i>Change Agents</i> ).
6. Lebih berpendekatan legalistis ( <i>Legalistic Approach</i> )	8. Lebih berpendekatan lingkungan ( <i>Ekological Approach</i> ). Berorientasi pada kegiatan ( <i>action oriented</i> ) dan bersifat pemecahan masalah ( <i>problem Solving</i> ).

## B. Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintah Desa

### 1. Pemerintah Daerah

#### a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain:

“Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.”

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, ect.*



Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (W. Riawan Tjandra 2009 : 197)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau



Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Fungsi Pemerintah Daerah**

Fungsi Pemerintah Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah:

1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah: dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

#### **2. Desentralisasi**

##### **a. Pengertian Desentralisasi**

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk



mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian ini ada beberapa unsur di dalam desentralisasi unsur yang pertama adalah unsur penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, unsur selanjutnya Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan di Daerah, dari unsur-unsur ini tampak sekali bahwa Daerah diberikan ruang untuk melakukan inovasi dan improvisasi terhadap jalannya Pemerintahan di daerah dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap kebutuhan daerah.

Menurut Sidik dalam Hanafi (2009 : 2) desentralisasi mengenai wewenang pemerintah menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial, dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal.

Menurut Kelsen dalam Handoyo (2009 : 293) pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara. Menurut Kelsen negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*). Oleh sebab itu pengertian desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Di dalam negara ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang sering disebut sebagai kaidah sentral (*central norm*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian wilayah-wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah local (*decentral or local norm*). Jadi menurut Kelsen, apabila kita membicarakan tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan



dikaitkan dengan lingkungan tempat berlakunya suatu tatanan hukum yang berlaku sah tersebut.

Manan yang dikutip oleh Handoyo menyatakan tentang desentralisasi adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri dari satuan-satuan Pemerintahan Pusat dan satuan pemerintahan yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan territorial ataupun fungsi pemerintahan tertentu.

Soedjito (1984 : 20) menyatakan bahwa.

“Desentralisasi memiliki arti sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan untuk dilaksanakan.”

#### **b. Perspektif Desentralisasi**

Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara bahkan telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Minat terhadap desentralisasi ini juga senada dengan kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan internasional (Conyens, 1983 : 97).

Kini desentralisasi telah tampil universal dan diakomodasi dalam berbagai pandangan yang berbeda. Untuk memahami keberadaan dan arti penting *local government* sebagai konsekuensi desentralisasi ini maka sebaiknya perlu disimak perkembangan teoritis dari berbagai perspektif yang ada dalam memandang *local government* sebagaimana dipaparkan oleh Smith (1985 : 18-45).



Terdapat tiga perspektif dalam melihat desentralisasi, yakni *liberal democracy*, *economic interpretation*, dan *marxist interpretation*. Dalam pandangan demokrasi liberal, *local government* membawa dua manfaat pokok. Pertama, ia memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena *local government* itu mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat, dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik.

Kedua, *local government* memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik (*the demand for public goods*). 'Demand' dalam preferensi pasar swasta lebih mudah diketahui melalui kemauan untuk membayar, akan tetapi dalam politik, ia sulit diidentifikasi karena relasi yang rumit antara barang, harga, pajak, pemilihan dan preferensi politik, partisipasi, dan kepemimpinan. Desentralisasi mampu mengurangi persoalan ini dengan meningkatkan jumlah unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan publik.

Ketiga, desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik (*the supply of public goods*). Terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan dan barang publik diselenggarakan tersentralisasi. Semakin besar organisasinya maka semakin besar pula kecenderungannya untuk memberikan pelayanan.

Semakin monopolistik pemerintah maka semakin kecil insentif dan inovatifnya. Berdasar pada teori, yurisdiksi terfragmentasi akan lebih



memberikan kepuasan kepada konsumen daripada kewenangan yang terkonsolidasi. Desentralisasi akan memberikan peluang antar yurisdiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan kepuasan kepada publik atas penyediaan barang dan layanannya.

Interpretasi Marxist tampaknya masih cenderung melihat negara sebagai satu kesatuan dan tidak perlu dipisah-pisah antar wilayah geografis.

Terdapat beberapa penjelasan yang melandasi ketidak berpihakan pandangan ini terhadap desentralisasi. Pertama, pandangan ini melihat bahwa pembagian wilayah dalam konteks desentralisasi hanya akan menciptakan kondisi terjadinya akumulasi modal sehingga memunculkan kembali kaum kapitalis.

Kedua, desentralisasi juga akan mempengaruhi konsumsi kolektif sehingga akan dipolitisasi. Konsumsi kolektif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan atas dasar kepentingan semua kelas. Desentralisasi hanya akan menghasilkan ketidak-adilan baru dalam konsumsi kolektif antar wilayah.

Ketiga, meskipun demokrasi pada dasarnya akan menempatkan mayoritas dalam pemerintahan daerah (yang berarti seharusnya kelas pekerja yang mendominasi, tetapi ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh kaum kapitalis untuk menghalang-halangi munculnya kelas pekerja dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan daerah tetap merupakan simbol demokrasi liberal dan tetap akan dikuasai oleh kaum kapitalis.



Keempat, dalam kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan, maka pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan aparat pemerintah pusat untuk menjaga kepentingan monopoli kapital. Dalam bidang perencanaan, desentralisasi juga tidak akan pernah menguntungkan daerah-daerah pinggiran dan membiarkannya dengan melindungi daerah kapitalis. Desentralisasi juga menghindarkan redistribusi keuangan dan pajak dari daerah kaya ke daerah miskin. Desentralisasi hanya akan menghilangkan tanggung jawab kaum borjuis terhadap daerah-daerah yang tertekan.

Kelima, terdapat berbagai rintangan mengenai bagaimana demokrasi lokal akan berjalan dalam suasana desentralisasi. Rintangan ini mencakup aspek ekologis, politik, dan ekonomi yang menyebabkan demokrasi di tingkat lokal hanya akan mengalami kegagalan. Menurut pandangan Marxist semua ini hanya akan dapat ditanggulangi oleh sentralisasi yang bertujuan untuk redistribusi dan keadilan.

### c. Prinsip-prinsip Desentralisasi

Menurut Manan seperti yang dikutip oleh Handoyo (2009) ada beberapa Latar Belakang perlunya desentralisasi, khususnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Negara Hukum: di dalam negara hukum di samping mengenal adanya pemisahan kekuasaan, yakni pemisahan atau pembagian kekuasaan secara horizontal diantara ketiga cabang kekuasaan di dalam negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), juga dikenal adanya



pemencaran kekuasaan, yakni pendistribusikan kekuasaan menurut garis vertikal. Dengan prinsip inilah maka desentralisasi merupakan sarana yang tepat untuk melaksanakan pemencaran kekuasaan.

2. Prinsip Demokrasi: Dalam negara demokrasi, kebutuhan akan partisipasi rakyat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, keterlibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan suatu keharusan.

3. Prinsip Welfare State: Dalam negara kesejahteraan, fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public services*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum warganya. Fungsi semacam ini tentu tidak dapat berjalan dengan baik jika pelaksanaannya dilakukan secara sentralistik.

4. Prinsip Kebhinekaan: Dalam negara yang komposisi masyarakatnya demikian beragam, tidaklah mungkin untuk melakukan penyeragaman (uniformitas) kebijaksanaan dan keputusan politik. Karakteristik dan kehendak masing-masing daerah yang berbeda-beda haruslah menjadi bahan pertimbangan utama.

### 3. Pemerintah Desa

#### a. Pengertian Desa

Menurut Ilmu Kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu dalam hubungan dengan manusia lain. Sejak lahir sampai mati manusia berhubungan dengan sesamanya. Secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antar manusia.



Dalam rangka usaha tersebut manusia bertempat tinggal bersama-sama disuatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Alam sekitar manusia mempengaruhi terbentuknya golongan manusia yang bertempat tinggal bersama-sama mendiami tempat tertentu. Bahaya binatang buas, serangan dari golongan-golongan lain, keadaan tanah dan sebagainya mendorong manusia untuk bertempat tinggal bersama. Alam sekeliling yang lambat laun tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan golongan yang mendiami tempat tersebut mengakibatkan sebagian orang meninggalkan tempat tinggal bersama sebelumnya ke tempat yang baru dimana mereka bisa mempunyai kehidupan yang baru. Pembentukan baru tersebut dalam istilah Jawa yaitu “*babat*” (yaitu membuka lahan baru).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal bersama yang sekarang disebut “Desa” ditimbulkan oleh berbagai unsur, yaitu:

- a. Sifat manusia sebagai makhluk sosial
- b. Unsur kejiwaan
- c. Alam sekeliling manusia
- d. Kepentingan yang sama
- e. Bahaya dari luar (Surianingrat, 1985 :12)

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur desa. Menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2007:10) unsur-unsur yang harus ada dalam desa adalah :

- a. *Daerah*, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.



b. *Penduduk*, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

c. *Tata Kehidupan*, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Kata “desa” berasal dari bahasa India yaitu “*swadesti*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas Soetardjo dalam (Wasistiono dan Tahir, 2007 :7).

Bintarto dalam bukunya Wasistiono dan Tahir tentang Prospek Pengembangan Desa tahun 2007 memandang desa dari segi geografis, mendefinisikan desa sebagai :

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Tentang pengertian desa tersebut, lebih lanjut Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2007 : 10) menjelaskan bahwa :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa setempat yang begitu kental, tingkat pendidikan yang



relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Baouman dalam Wasistiono dan Tahir (2007 : 8) melihat dari pergaulan hidup mendefinisikan desa :

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak dalam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Definisi di atas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya ; di Aceh dipakai nama “*Gampong*” atau “*Meunasah*” buat hukum yang paling bawah, Batak daerah hukum setingkat desa disebut “*Kuta*” atau “*Huta*”, Minangkabau menggunakan istilah Negari, di Sumatera Timur daerah hukum ini dinamakan “*Dusun*” atau “*Tiuh*” dan sebagainya.

Adanya berbagai istilah untuk kelompok tempat tinggal bersama itu menunjukkan bahwa apa yang disebut “Desa” sekarang ini telah ada di Indonesia jauh sebelum orang Eropa ataupun bangsa lainnya datang. Betapapun sederhananya Desa pada waktu itu, Desa tidaklah berasal dari luar Indonesia tetapi asli dan murni Indonesia (Surianingrat, 1985 : 13).

Disini persamaan nasib dan pengalaman mempunyai peran yang akan menimbulkan hubungan sosial yang akrab. Unsur-unsur desa merupakan suatu yang penting, sehingga tidaklah berlebihan jika desa disebut sebagai sendi negara.



## b. Pemerintah Desa

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 202 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 26 PP No. 72 Tahun 2005

tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa lainnya terdiri atas : sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan.

### a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Kepala Desa memimpin staf atau pembantunya menyelenggarakan Pemerintah Desa.

Menurut (Surianingrat 1985:81). Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bersama-sama dengan pamong desa Kepala Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga Desa dan menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai batasan-batasan tertentu sehingga tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Pasal 14 (1) UU



No.72 Tahun 2005). Dalam menjalankan tugas kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 14 (2) UU No.72 Tahun 2005).

Kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, masa jabatannya ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. Lama masa jabatan Kepala Desa ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan berhitung sejak tanggal ditetapkan. Selain itu



masa jabatan Kepala Desa ini juga berbeda dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Presiden yang ditetapkan oleh undang-undang selama 5 (lima) tahun.

Implikasi masa jabatan 6 (enam) bagi Kepala Desa ini adalah sulitnya menentukan mekanisme perencanaan pembangunan lima tahunan atau RPJM Desa. Selain itu, lamanya masa jabatan yang mungkin dijalani selama 12 (dua belas) tahun bisa menjadi anti klimaks dan kinerja kepala Desa (Wasistiono dan Tahir, 2007 : 136).

b. Sekretaris Desa

Pengisian jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) dari PNS merupakan langkah maju dalam upaya mengembangkan manajemen pemerintahan di tingkat Desa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 202 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”.

Selanjutnya penjelasan pasal ini berbunyi “Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara peraturan perundang-undangan”. Pengangkatan Sekdes dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

c. Pelaksana teknis Lapangan

Istilah Pelaksana Teknis Lapangan pada dasarnya mengacu kepada individu yang diberi tugas menurut fungsi-fungsi tertentu. Batu Surianigrat dalam bukunya Pemerintahan Administrasi Desa dan



Kelurahan tahun 1985, menggunakan istilah “Pamong Desa” untuk menyebut Pelaksana Teknis Lapangan. Perangkat Desa ini di jaman dahulu sejenis jabatan Modin yang mengurus bidang keagamaan, Tuwowo yang bertugas mengurus pengairan desa, Jogoboyo atau pegawai polisi desa, Kebayan sebagai pesuruh desa, Carik sebagai juru tulis desa, Kamituwa sebagai penanggungjawab atas masing-masing dukuh dan lain-lain. Dalam penggunaan istilah-istilah Pelaksana Teknis Lapangan atau Pamong Desa, untuk masing-masing daerah mempunyai istilah-istilahnya sendiri.

“Pemahaman tentang Pelaksana teknis Lapangan ada perbedaan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004. Dalam penjelasan tersebut, disebutkan : “Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau sebutan lain”. Kepala Urusan bermakna pimpinan unit kerja yang mengurus fungsi-fungsi tertentu, misalnya urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kemasyarakatan. Hal tersebut jelas berbeda dengan pemahaman Pelaksana Teknis Lapangan sebagai individu yang melaksanakan tugas menurut fungsi-fungsi tertentu.” (Wasistiono dan Tahir, 2007:137).



## C. Partisipasi Masyarakat

### 1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004: 84)

partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi

masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: *pertama*, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi.

*Kedua*, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Menurut Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Dan juga Adisasmita (2006) mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat



merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan)
- c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi)

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau banyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian "pengikutsertaan" atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

## 2. Pentingnya Partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi



masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:71).

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of renponbility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab (Tjokroamidjojo, 2002) Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa dimensi, yaitu,

a) Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)



b) Sumbangan materi (dana, barang dan alat)

c) Sumbangan tenaga (berkerja atau memberi kerja)

d) Memanfaatkan atau melaksanakan pelayanan pembangunan

e) Partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit untuk difenisikan akan tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mngembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Menurut Tjokrowinoto (2002: 48) arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.

c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tetap terungkap.

d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.

e. Partisipasi merupakan *game zone* (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.

f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.



g. Partisipasi menopang pembangunan

h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.

i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan has daerah.

j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, *planning* dan keuntungan lainnya, yaitu:

1) Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.

2) Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.



3) Dari segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.

4) Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi perilaku *us*.

Sementara itu menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi adalah:

(1) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum.

Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat

lokal ( R. Adisasmita, 2006: 35). Untuk dapat mewujudkan keterlibatan partisipasi masyarakat agar dapat berdaya, sangat dibutuhkan kebebasan, kesempatan, dan ruang gerak yang tersusun dalam empat tingkatan, sebagai mana yang diungkapkan oleh Kremer dalam Saiful Arif ( 2006: 150-151), sebagai berikut:

1. Partisipasi akan mendukung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan



2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program infrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu kepentingan-kepentingan dan saran-saran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.

3. Partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen perlu memperoleh stimulan dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan yang kurang memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.

4. Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dan dalam rangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Schubeller (1996:3) menyatakan, bahwa partisipasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan menurutnya ada 4 pendekatan strategi partisipasi yaitu:

1. *Community-Based Strategies*

Merupakan bentuk paling dasar dari pembangunan partisipatif.

2. *Area-Based Strategies*

Merupakan bentuk umum dari program-program pemerintah.

3. *Functionally-Based Strategies*

Merupakan struktur fungsional dari sistem infrastruktur sebagai kerangka referensi.



#### 4. *Process-Based Strategies*

Dimana memerlukan seluruh proses manajemen infrastruktur sebagai kerangka referensi.

Lebih lanjut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) juga merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

##### 1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill, 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

##### 2. Meningkatkan proses belajar

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

##### 3. Mengeliminir perasaan terasing

Karena turut aktifnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

##### 4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program



partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

#### 5. Menciptakan kesadaran politik

John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

#### 6. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Menurut Verba dan Nie (1972) bahwa melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

#### 7. Menjadi sumber dari informasi yang berguna

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.



8. Merupakan komitmen sistem demokrasi

Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974).

### 3. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16), bentuk-bentuk partisipasi meliputi:

1. konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa;
2. sumbangan spontan berupa uang dan barang;
3. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga;
4. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat;
5. sumbangan dalam bentuk kerja;
6. aksi massa;
7. mengadakan pembangunan di kalangan keluarga; dan
8. membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Adapun jenis-jenis partisipasinya meliputi:

1. pikiran;
2. tenaga;
3. pikiran dan tenaga;
4. keahlian;
5. barang; dan
6. uang. (Sastropoetro: 1988)



## D. Pembangunan Desa

### 1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa terpadu adalah strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa (Poostchi,1986).

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai:

- (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.
- (2) Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu di analisis/secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial).

### 2. Paradigma Pembangunan Desa

Paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Selama ini paradigma pembangunan mengalami proses perkembangan diantaranya meliputi:



pertama diawali dengan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), kedua pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*), ketiga adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*). Paradigma pembangunan pada suatu waktu tertentu dipergunakan sebagai acuan pada proses pembangunan bangsa di suatu negara, sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunannya. Peningkatan kualitas pembangunan yang benar-benar berorientasi untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan kepentingan kesejahteraan rakyat adalah merupakan salah satu perwujudan *good governance*.

Berikut akan diuraikan secara berturut-turut beberapa paradigma pembangunan mulai dari strategi pertumbuhan, pertumbuhan dengan pemerataan teknologi tepat guna, kebutuhan dasar pembangunan, pembangunan berkelanjutan, konsep pemberdayaan, dan paradigma pembangunan berpusat pada manusia (Suryono, 2001).

### 1. Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy*)

Melalui pendekatan ini, memang pada akhirnya banyak negara berkembang telah terbukti berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapitanya. Namun keberhasilan paradigma pertumbuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah membawa berbagai akibat yang negatif, terutama dampak sosial dan lingkungan hidup. Momentum pertumbuhan yang dicapai dengan pengorbanan besar ini misalnya, pengrusakan ekologis lingkungan, penyusutan sumber daya alam, timbulnya



kesenjangan sosial, dan munculnya tingkat ketergantungan negara berkembang kepada negara maju, akhirnya memetik kritik tajam dari beberapa kelompok pemikir yang ditunjukkan pada paradigma ini misalnya dari Massachusetts *Institute of Technology and Club of Rome* yang memperingatkan bahwa jika laju pembangunan dunia dan pertumbuhan penduduk tetap dibiarkan seperti ini, maka lambat atau cepat akan terjadi kehancuran total sistem planet bumi.

Dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setingginya seringkali mengakibatkan terabaikannya upaya pembinaan kelembagaan dan pembinaan kemampuan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui *central imposed blueprint plan* yang dirumuskan oleh para teknokrat terhadap alokasi sumber-sumber pembangunan cenderung sentralistik dan mengintervensi potensi masyarakat dan menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dan birokrat. Karenanya sifat menjadi disempowering dan kurang menekankan pada kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Untuk mengatasi masalah ini, dapat ditanggulangi melalui suatu kombinasi kebijaksanaan, yang meliputi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, usaha pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk.



## 2. Pertumbuhan Dengan Pemerataan (*Growth With Distribution*)

Strategi ini untuk pertama kali dikemukakan oleh Singer (1972) dalam sebuah kertas kerja untuk misi lapangan kerja ILO ke Kenya. *Growth With*

*Distribution* menggambarkan empat pendekatan pokok yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan golongan miskin, antara lain :

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien, yang memanaftnya dapat dinkmati oleh semua golongan masyarakat.
- b. Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
- c. Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.
- d. Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin misalnya melalui land reform.

## 3. Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology*)

Pendekatan ini diyakini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang karena melalui teknologi tepat guna ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan penduduk.

Misi teknologi tepat guna ini adalah mengurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan



produktivitas kerja, meningkatkan dinamika dan kreatifitas masyarakat dalam berfikir dan bekerja, mempersiapkan masyarakat untuk mampu menerima perubahan dan pembaharuan teknologi, dan melatih sikap mandiri.

Namun demikian, pendekatan ini pun pada akhirnya juga dianggap tidak dapat memuaskan usaha-usaha penciptaan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi jurang kesenjangan ekonomi dan sosial.

Hal ini disebabkan antara lain, keterbatasan pengembangan teknologi tepat guna di negara sedang berkembang yaitu

- a. Tidak adanya institusi yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan teknologi tepat guna.
- b. Selisih harga yang cukup besar antara teknologi impor dengan menciptakan sendiri teknologi baru di dalam negeri, dimana teknologi impor lebih murah dibanding dengan membuat sendiri di dalam negeri.
- c. Sistem nilai yang tidak mendukung, dimana para peneliti dan praktisi lebih suka bekerja dengan teknologi tinggi dari pada menggunakan teknologi madya, walaupun teknolog sederhana sudah diketahui secara luas akan dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak dan ramah lingkungan.

#### 4. Kebutuhan Dasar Pembangunan (*Basic needs Development*)

Konsep dasar pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hanya pangan, pakaian, dan papan saja melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan, dan



pendidikan. Selama penduduk miskin sebagian besar terdapat di daerah pedesaan, maka pendekatan basic needs ini kemudian menjadi tekanan dan unggulan dari pembangunan desa.

Pada pertengahan 1970-an, pendekatan ini sangat populer dan telah mengesankan citra lain dari pembangunan yang dilakukan pada tahun 1960-an yang lebih digerakkan oleh mitos-mitos pertumbuhan. Pada akhir 1970-an, “basic needs strategy” telah dianggap “kenangan masa lampau” dengan catatan-catatan besar yang menekankan pentingnya pembangunan di pedesaan, namun tak satupun yang dapat dihasilkan.

##### 5. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Ide dasar dari konsep ini bermula dari “*The Club of Rome*” pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer, para ahli ilmu teknik, dan ilmuwan se-eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan. Pesan penting dari dokumen tersebut diantaranya, bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Sustainable diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan pada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.



## 6. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment Concept*)

Konsep empowerment sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan lokalitas, sebab *civil society* akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal.

Konsep ini muncul karena adanya dua hal yakni kegagalan dan harapan.

Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

## 7. Pembangunan Berpusat pada Manusia (*People Centre Development*)

Belajar dari pengalaman pada dasawarsa ketiga pada awal 1980-an di negara berkembang penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*) yang ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan dan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan,



pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) agar dapat menjadi aktor pembangunan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian dan etos kerja.

Fokus perhatian dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia ini (*people centered development paradigm*) ini adalah perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia (Korten, 1984:300 dalam Tjokrowinoto, 1996).

Paradigma ini yang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan adalah:

- a. Pelayanan sosial (*social service*);
- b. Pembelajaran sosial (*social learning*);
- c. Pemberdayaan (*empowerment*);
- d. Kemampuan (*capacity*);
- e. Kelembagaan (*institutional building*)



### 3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa disebut berhasil menurut Ndraha (1988: 24) jika (1) Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; (2) Rasa Tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan; (3) Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang, telah dapat ditingkatkan/ditumbuhkan, dan jika (4) prasarana fisik dan (5) Lingkungan Hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara. Yang disebut (1) sampai dengan (3) berkaitan dengan masyarakat desa, sedangkan (4) dan (5) mengenai lingkungan fisiknya.

#### 1. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui usaha (Ndraha: 1988: 27)

- a. Memberi stimulasi kepada masyarakat. Stimulasi berkaitan dengan motivasi.
- b. Menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- c. Menumbuhkan atau menanamkan kesadaran akan kebutuhan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat, dengan memberikan pendidikan dalam arti luas.

#### 2. Menumbuhkan Rasa Tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan

Rasa tanggung jawab dapat ditumbuhkan antara lain dengan jalan (Ndraha: 1988):

- a. Yang bersangkutan dipercayakan untuk melakukan suatu tugas yang ia setujui.



b. Yang bersangkutan di beri kesempatan untuk belajar menerima tugas atas hal-hal kecil, untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang besar.

c. Yang bersangkutan diberi kesempatan atau ditugaskan untuk mempraktekan sifat-sifat atau nilai-nilai yang baik yang diajarkan padanya, seperti kejujuran, kesabaran, kerja sama, penghargaan, dan ketaatan.

d. Yang bersangkutan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

e. Dalam diri yang bersangkutan ditanamkan keyakinan akan kemampuannya sendiri dalam menghadapi pelbagai tantangan.

f. Yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memutuskan apa yang dikehendaknya.

### 3. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat

Yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan masyarakat disini menurut Ndraha (1982:30) ialah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bisa berkembang sendiri. Kemampuan lazim juga disebut swadaya. Sebenarnya kemampuan desa dapat ditingkatkan. Menurut Hanson (dalam Ndraha, 1982:31), pemerintah memegang peranan penting dalam “*breaking the cake custom*”. Pemerintah mampu melakukannya karena ia memiliki sebagian besar “*know how*” dan sumber-sumber.

Menurut UN (dalam Ndraha, *Ibid*) membangun swadaya masyarakat berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Oleh karena itu program-program pemerintah dibidang sosial ekonomi di tingkat desa



berfungsi sebagai sarana pembangunan swadaya masyarakat yang bersangkutan.

Dari sinilah menurut penulis letak pentingnya partisipasi masyarakat.

#### 4. Membangun Sarana Fisik Desa

Selain sarana-sarana non-fisik, pembangunan desa mempunyai sasaran yang bersifat fisik (Ndraha, 1982:33). Sasaran fisik itu dapat diketahui dari program-program sektoral pembangunan desa. Setiap program terdiri atas satu atau lebih proyek. Setiap proyek mempunyai target yang dijadikan tolak ukur dalam penilaian keberhasilannya (Ndraha, 1982).

#### 5. Membangun Lingkungan Hidup Yang Serasi

Prajudi (dalam Ndraha, 1982) menyatakan bahwa Pemerintah memegang peranan penting dalam mengadministrasikan lingkungan hidup.

Menurut Prajudi, peranan Pemerintah yang dimaksud adalah dalam beberapa hal:

1. Penguasaan lingkungan hidup (membuat Undang-undang tentang lingkungan hidup, perlindungan, peradilan).
2. Administrasi lingkungan:
  - a. Administrasi kesehatan lingkungan
  - b. Administrasi penyelamatan lingkungan
  - c. Administrasi tatalingkungan.
3. Pelaksanaan Administrasi lingkungan
  - a. Perizinan.
  - b. Perencanaan penggunaan lingkungan.
  - c. Kepolisian lingkungan.



d. Perundang-undangan lingkungan.

e. Syarat dan kriteria penggunaan lingkungan.

f. Peradilan lingkungan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam membangun prasarana (kondisi) fisik dan lingkungan hidup yang serasi, Pemerintah memegang peranan yang amat menentukan. Adapun problematika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Solekhan (2014: 157) dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat, dan 2) Melemahnya Modal Sosial. Untuk lebih detailnya, ketiga problematika partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

#### 1. Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah arena bagi masyarakat, baik secara individual maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. (Moch. Solekhan, *ibid*)

#### 2. Regulasi Kurang Memberi Ruang/Akses Partisipasi Masyarakat

Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Peraturan perundang-undangan yang ada sebetulnya sudah cukup memberikan ruang partisipasi masyarakat, tetapi ketika perundang-undangan tersebut diterjemahkan kedalam Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasional menjadi



kurang merespons semangat dan amanah perundang-undangan tersebut secara konsisten. (Solekhan, *Ibid*:159)

### 3. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. Sebagaimana diungkapkan oleh bardhan (dalam Solekhan, 2014:161), bahwamodal sosial itu merupakan serangkaian norma, jaringan, dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Pendapat lain disampaikan oleh Robert Putnam (dalam Solekhan, 2014) yang mengatakan, bahwa modal sosial itu ada kaitannya dengan asosiasi horizontal antar indyidu, artinya modal sosial itu terdiri dari *social networks* dan norma yang mendorong produktivitas masyarakat

Suatu upaya menumbuhkan/mengembangkan partisipasi masyarakat membutuhkan dua langkah sekaligus yaitu:

#### 1) Penguatan Kapasitas Kritis Masyarakat (Desa) Dan Keterampilan Politik

Upaya yang melandaskan diri pada suatu keyakinan dan kepercayaan, bahwa masyarakat pada dasarnya sudah memiliki suatu kesadaran yang kuat mengenai pentingnya partisipasi atau pentingnya keterlibatan masyarakat. Dibutuhkan langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat untuk kembali memperkuat pemahaman, pengetahuan dan teknik-teknik yang dimiliki, khususnya untuk bisa ikut mengambil bagian secara produktif dan demokratis dalam proses politik dalam hal ini



pengambilan kebijakan ditingkat desa. Untuk mencapai maksud ini dapat dikembangkan melalui berbagai program penguatan yaitu:

a) Pendidikan Politik

Hal ini dimaksud untuk memungkinkan masyarakat baik sebagai individu ataupun kelompok dapat memahami dengan “utuh” proses politik ( proses pemerintahan) dan proses sosial, budaya dan ekonomi yang ada. Pemahaman yang utuh tidak dalam arti penguasaan suatu pengetahuan, melainkan adanya kemampuan dan kemauman masyarakat untuk terus menerus memeriksa rialitas sosial yang ada, mengembangkan refleksi daripadanya dan berani mengambil sikap atas konisi-kondisi yang ada.

b) Pengembangan Area-Area Pengambilan Kebijakan

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa hampir semua arena pengambilan kebijakan tersentralisasi pada figur Kepala Desa, kondisi ini tentu tidak mendukung suatu proses demokrasi. Maka itu, dibutuhkan arena baru yang lebih partisipatif, ditandai dengan pembentukan yang terlepas dari intervensi kekuasaan dan memungkinkan masyarakat sendiri yang mengelola dan membentuk aturan main dalam arena tersebut. Arena arus bawah ini akan memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran alternatif dan kritis. Sehingga akan memperkaya gagasan dan memperluas keterlibatan masyarakat. maka dibutuhkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai arena partisipasi masyarakat.

2) Penguatan Kelembagaan Desa Bermakna ke dalam penguatan kelembagaan internal, yakni yang mengurus persoalan-persoalan internal



desa, dapat pula bermakna sebagai penguatan eksternal melalui pengembangan wahana “konsolidasi” kelembagaan desa untuk memperkuat kelembagaan itu sendiri. adanya BPD pada dasarnya memungkinkan untuk mendorong suatu proses baru yang berbasis arus bawah. Adapun menurut Juliantara (2004: 85) pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mempunyai beberapa maksud yaitu:

- a. Partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan rakyat/masyarakat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan pembangunan yang merugikan
- b. Partisipasi tidak saja menjadi cermin kongkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan untuk memperjuangkannya tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikan kepentingan rakyat
- c. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat, prinsip ini sekaligus menjadi titik pijak suatu kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai kebodohan melainkan sebagai objek pembangunan yang mempunyai kemampuan
- d. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan ada sikap yang terbuka dari penyelenggara pemerintahan tentu saja akan menjadi basis bagi suatu “kepercayaan sosial



politik” yang dengan demikian akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi.

Wrihatnolo dan Nugroho (2006: 57) mengemukakan bahwa ada tiga asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, yaitu:

1. kepemimpinan pembangunan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan tujuan perencanaan.

2. Manajemen sumber daya pembangunan.

Sumber daya pembangunan merupakan aspek pertama yang menentukan perencanaan pembangunan agar asumsi perencanaan dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya pembangunan yang meliputi segenap upaya manajemen dalam mengelola fungsi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

3. Prosedur perencanaan. Prosedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil.

Sedangkan Menurut Tjokromidjojo dalam Syaiful Arif ( 2006: 148-149) ada tiga elemen yang mendapat perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu:



### 1. Masalah Kepemimpinan.

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi.

### 2. Masalah Komunikasi.

Gagasan-gagasan mengenai kebijakan dan rencana hanya akan dapat dukungan, bila diketahui dan dimengerti. Sebab hal tersebut mencerminkan sebagai atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat.

### 3. Masalah Pendidikan.

Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, baik formal maupun informal. Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat yang dikenal dengan istilah pembangunan partisipatif atau bisa juga disebut dengan istilah perencanaan partisipatif.

Hal ini sangat terkait erat dengan posisi negara dan masyarakat dalam kelangsungan unsur-unsur publik yang akhirnya juga terkait dengan kelangsungan negara berikut tatanan bermasyarakat yang ada didalamnya. Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika berhadapan dengan pemerintah yang dianggap



sebagai perwujudan negara itu sendiri. Slamet (2003: 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat,
- 2) penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan.
- 3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan.
- 4) pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional)
- 5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Cahyono (2006, 1), proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :



- (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat,
- (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya,
- (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat,
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
- (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada
- (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang,
- (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi,
- (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut

Arikunto (2009:234), metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode ini berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi sehubungan dengan keadaan yang sedang diteliti, dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal terkait dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Nazir (2005:54) “ metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki ”. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi



(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011: 9).

Pendekatan Kualitatif yang dimaksud adalah dengan menggunakan data-data non statistik yang tertera dalam tabel-tabel yang tersedia, pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu obyek penelitian bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebilitas yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu.

Spradley dalam Sanapiah Faisal (1988) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan



2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain organizing tertentu
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, (Sugiono, 2009: 207-209)

Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari
  - a. Keterlibatan dalam sumbangan pemikiran
  - b. Keterlibatan dalam sumbangan materi, barang dan dana
  - c. Pemanfaatan Pembangunan
  - d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor)
  - e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki
2. Wujud Pembangunan Fisik Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro:
  - a. Pembangunan Saluran Air (gorong-gorong)
  - b. Pembangunan Pemavingan Jalan

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan



pertimbangan bahwa di Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro belum membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk berpartisipasi, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun situs dari penelitian ini adalah Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Sumber Data**

Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder, (Sugiono, 2009: 137)

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yang dimaksud adalah, hasil wawancara dari Aparatur Desa Drs. Muhtarom selaku Sekretaris desa dan beberapa masyarakat yaitu Hj Masalamatu, Ulya Lutfiana dan ibu Kusmiati.

##### **b. Data Skunder**

Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu lewat orang lain dan dokumen-dokumen profil desa, yang diperoleh dari Aparat desa.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2009, hlm. 226-240) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

### 1. Observasi Langsung

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiono, 2009, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Marshall (1990) dalam Sugiono, 2009, mengatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiono, 2009, mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*).

Observasi langsung pada lokasi penelitian dilakukan pada tanggal 13-22 Desember 2012. Observasi langsung ini dilakukan dengan cara peneliti mengamati langsung terhadap implementasi, faktor yang mempengaruhi, dampak yang ditimbulkan dan model fokus penelitian.



## 2. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiono, 2009, mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback (1988) dalam Sugiono, 2009, menyatakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengeinterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Esterberg (2002) dalam Sugiono, 2009, mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu :

a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semistruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.



Lincoln dan Guba dalam Sugiono, 2009, mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfermasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yakni dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan langkah-langkah wawancara di atas.

Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti tulisan (catatan harian, dll), gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain atau karya-karya monumental dari seseorang semisal karya seni (gambar, patung, film, dll). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan profil



desa dan beberapa dokumentasi peneliti sebagai pelengkap dari hasil observasi yang dilakukan.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademis maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan, (Sugiono, 2009: 222)

#### **G. Analisis Data**

Menurut Sugiono (2009: 245), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam



pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

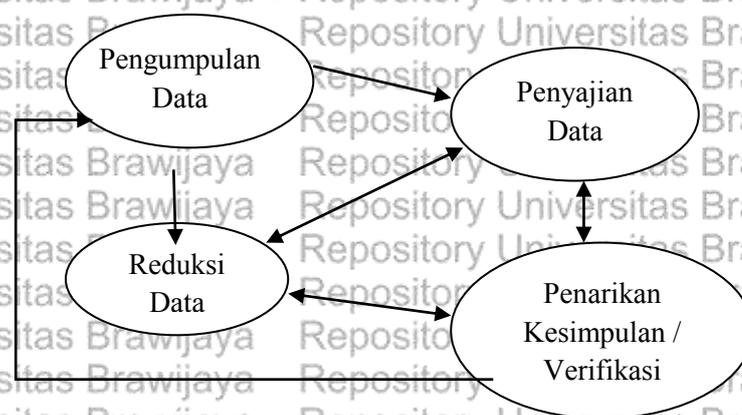
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2009), menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Namun juga peneliti dalam penyajian data menggunakan tabel untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

**Gambar 3.1: Komponen Analisis Data Model Interaktif**



Sumber : Miles dan Huberman Terjemahan dalam Sugiyono (2009)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Kabupaten Bojonegoro

###### a. Geografi

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak  $\approx$  110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur. Topografi

Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi disepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah.

Dari wilayah seluas diatas, sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Untuk memonitor rata-rata curah hujan yang jatuh, di Kabupaten Bojonegoro tersedia sebanyak 22 buah stasion penangkar hujan yang tersebar di 16 kecamatan. Dari pantauan tersebut, tercatat jumlah hari hujan di Kabupaten Bojonegoro pada periode 3 tahun terakhir sejak tahun 2004 tercatat sebesar 60 hari, pada tahun 2005 naik menjadi 64 hari dan pada tahun 2006 turun lagi



menjadi 61 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan yang dimonitor oleh 16 stasiun pengangkar hujan diatas, menunjukkan adanya keterkaitan dengan jumlah hari hujan. Tercatat, rata-rata curah hujan pada tahun 2004 sebanyak 106 mm, tahun 2005 naik sebanyak 146 mm dan pada tahun 2006 turun sebanyak 120 mm.

Sementara itu, untuk menanggulangi kekurangan air untuk keperluan pengairan lahan pertanian di musim kemarau, dilakukan dengan cara menaikkan air dari Sungai Bengawan Solo melalui pompanisasi. Pompanisasi ini tersebar di 8 kecamatan yang meliputi 24 desa.

**Batas Wilayah**

Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tuban

Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan

Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang

Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

**Letak Geografis**

Bujur Timur : 111°25' dan 112°09'

Lintang Selatan : 6°59' dan 7°37'

**Uraian**

Dataran rendah : 18,71 persen pada ketinggian dibawah 25 m (Pusat Kota +15 m dpl)



Dataran tinggi : 81,29 persen pada ketinggian 25 m dpl Kemiringan :  $< 2\%$  merupakan yang terluas, 2 s.d 14,99 % meliputi 36,16 persen wilayah  $> 15$  persen merupakan 8,74 persen wilayah

#### Penggunaan Tanah

Tanah sawah 32,65%

Tanah kering 24,39%

Hutan negara 42,74%

Perkebunan 0,04%

Lain-lain 0,18%

#### b. Visi dan Misi

Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bojonegoro merupakan sarana bagaimana suatu gambaran masa depan daerah dapat dikomunikasikan dan disepakati. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah adalah kesepakatan seluruh pelaku pembangunan tentang apa wujud Kabupaten Bojonegoro dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan serta bagaimana mencapainya.

#### Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 adalah menetapkan visi yang merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.



Adapun perumusan visi beserta penjelasannya adalah sebagai berikut;

**VISI:**

**" TERWUJUDNYA PONDASI BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA, BAHAGIA, DAN BERKELANJUTAN "**

Pengertian dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**BOJONEGORO LUMBUNG PANGAN NEGERI:**

bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan.

**BOJONEGORO LUMBUNG ENERGI NEGERI:**

bermakna bahwa Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.



### BOJONEGORO YANG PRODUKTIF :

bermakna bahwa setiap sektor kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Meskipun sektor migas Bojonegoro menjadi andalan nasional dan memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro, namun sektor – sektor lain seperti sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa harus mendapatkan perhatian secara serius untuk bisa dipacu produktivitasnya dalam rangka meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro

### BOJONEGORO YANG BERDAYA SAING :

bermakna mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi dengan demikian setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Dengan berdaya saing, diharapkan Bojonegoro memiliki keunggulan kompetitif untuk memproduksi pangan, energi, jasa perdagangan, dan industri.



### BOJONEGORO YANG BERKEADILAN :

Bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan seimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat berlandaskan penerapan norma dan hukum bahwa setiap aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan mendapatkan jaminan keadilan dan rasa aman, baik secara fisik maupun non-fisik.

### BOJONEGORO YANG SEJAHTERA :

Bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan pemenuhan hak / pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sehingga setiap kegiatan dan produk pelayanan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera secara materiil dan non-materiil.

### BOJONEGORO YANG BAHAGIA :

Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dengan memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan ketenangan, kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, komunikasi, hubungan dan interaksi sosial, kebudayaan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious, pekerjaan dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan



bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Bojonegoro menjadi manusia yang produktif.

#### BOJONEGORO YANG BERKELANJUTAN :

Bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumberdaya yang ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan kata lain pembangunan daya tahan dan daya saing, terutama aspek sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan kehidupan demokratis.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Bojonegoro, maka ditetapkan misi Kabupaten Bojonegoro 2013-2018.

Misi - misi Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

MISI 1 :

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS,  
SEIMBANG DAN BERKELANJUTAN BERBASIS EKONOMI  
KERAKYATAN DA KEUNGGULAN DAERAH.**



Penjelasan MISI 1 :

Bermakna ekonomi rakyat yang secara konsisten meningkat dengan memberdayakan potensi dan SDM yang ada secara adil merata.

MISI 2 :

**MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP, PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT.**

Penjelasan MISI 2 :

Bermakna peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan secara merata adil dan merata, baik keterjangkauan harga, lokasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.

MISI 3 :

**MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR, DAN INDUSTRI JASA YANG BERKUALITAS.**

Penjelasan MISI 3 :

Bermakna peningkatan infrastruktur dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan ekonomi serta peningkatan keunggulan jasa pendidikan dan kesehatan.

**MISI 4 :**

**MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN NYAMAN.**

**Penjelasan MISI 4:**

Bermakna terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang nyaman, bersih, dan menyenangkan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja dan bermain, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

**MISI 5 :**

**MENINGKATKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT GUNA MENOPANG DAYA TAHAN, KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT YANG KONDUSIF SERTA MENJAGA KEHIDUPAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS.**

**Penjelasan MISI 5 :**

Bermakna modal sosial situasi yang kondusif untuk menjaga pembangunan dapat berjalan dengan stabil, penuh toleransi dan partisipatif, yang dibarengi dengan pemeliharaan ketahanan dan keamanan masyarakat dalam menuju masyarakat madani yang berbudaya.

**MISI 6 :**

**MENINGKATKAN PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN**



## TRANSPARAN BERLANDASKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

### Penjelasan MISI 6 :

Bermakna peningkatan kinerja pemerintahan dan paratur SDM pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik yang berlandaskan *good governance*

### c. Demografi

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih sulit.

Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk sebesar 1.430.316 jiwa atau 403.468 KK yang terdiri dari 721.445 laki-laki dan 708.871 perempuan. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro sehingga penduduk Kabupaten Bojonegoro sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

**Tabel 4.1 Data Kependudukan di Kabupaten Bojonegoro**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Penduduk :	1.401.258	1.430.313	1.472.865	1.450.889
	a. laki-laki	706.722	721.444	742.181	729.989
	b. perempuan	694.536	708.869	730.684	720.900
2	Sex Ratio	101,75	101,77	101,57	101,26
3	Rumah Tangga	389.587	403.468	431.835	443.680
4	Rata-rata Anggota Rumah Tangga	3,5	3,5	3,5	3,5
5	Kepadatan Penduduk	607	619	638	628
6	Pertumbuhan Penduduk		0,37	0,37	0,37

Dilihat dari struktur penduduk, masyarakat Kabupaten Bojonegoro didominasi penduduk usia muda. Konsentrasi penduduk sebagian besar berada pada kelompok usia 25-44 tahun dan paling sedikit penduduk pada usia 70-74 tahun. Dengan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif merupakan modal utama untuk meningkatkan produktifitas wilayah. Dengan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maka potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan berdaya saing.

#### **d. Sosial Ekonomi**

##### **Kondisi Tata Guna Lahan**

Sebagian besar lahan Kota Bojonegoro digunakan untuk hutan negara yaitu 42,74%. Bagian 32,65% digunakan untuk lahan persawahan. Kemudian 24,39%



digunakan sebagai lahan kering dan 0,04% digunakan sebagai lahan perkebunan.

Sisanya yaitu 0,18% digunakan untuk lain-lainnya dan Fasilitas Umum.

#### Kesehatan

Derajat kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari indikator-indikator pada angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB), angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI), rata-rata usia harapan hidup penduduk dan status gizi masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat kota Bojonegoro dari tahun 2003 samapi tahun 2007 mengalami peningkatan.

Usia harapan hidup dari 67,02 tahun menjadi 6,5 tahun. Angka kematian bayi (AKB) dari 6,8 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk angka kematian ibu melahirkan (AKI) meningkat dari 62,78 per 100.000 kelahiran menjadi 105 per 100.000 kelahiran hidup. Balita dengan satus gizi kurang menurun dari 16,73% menjadi 14,22%

#### Tenaga Kesehatan

Banyaknya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2007 mencapai 1.275 orang

3.4.4 Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2007, jumlah panti sosial yang ada di kabupaten Bojonegoro adalah sebanyak 11 buah, yang terdiri dari 14 panti sosial asuhan anak, 1 panti sosial bina remaja. Potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial meliputi 251 orang PSM, 47 wanita orang Wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial, 50 orang Satgasos Penanggulangan bencana alam dll.



## Ketenagakerjaan

1. Penduduk usia kerja Penduduk usia kerja umur 10-64 tahun selama 5 tahun terakhir ini meningkat rata-rata 3,79% per tahun

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja  
Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami perubahan yang bervariasi yaitu pada tahun 2003 sebesar 75,5% tahun 2004 sebesar 70,9% tahun 2005 sebesar 70,9%, tahun 2006 sebesar 70,9% dan tahun 2007 sebesar 70,9%. Dengan demikian rata-rata TPAK per tahun sebesar 71,9% yang berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk angkatan kerja kurang lebih 72 orang.

## 2. Gambaran Umum Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten

### Bojonegoro

#### a. Geografi

Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro memiliki luas wilayah sebesar 309,5 Ha. Curah hujan di Desa Sukorejo sebesar 12-41 mm, dengan suhu rata-rata harian 32°C. Adapun batas-batas Desa Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Mojo Kampung
2. Sebelah Selatan : Pacul
3. Sebelah Timur : Ngampel, Wedi
4. Sebelah Barat : Sumbang



### **b. Demografi**

Jumlah total Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2014 sebanyak 12400 Jiwa, terdiri dari 3.310 Kepala Keluarga, komposisi Jumlah Laki-laki 6044 dan perempuan 63536. Mata pencaharian rata-rata penduduk Desa Sukorejo adalah Karyawan Swasta dengan kualitas angkatan kerja laki-laki sebanyak 4473 dan perempuan sebesar 4580.

### **c. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro**

Desa Sukorejo dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Desa Bapak H.M. Budi Suprayitno yang dibantu 8 (delapan) aparatur Desa dan juga terdiri dari 2 (dua) Dusun Krajan dan Jambean. Selain itu di Desa Sukorejo ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 11 (sebelas) orang.

### **B. Penyajian Data**

Pembangunan menjadi ujung tombak peningkatan hidup masyarakat, sejahtera ataupun tidaknya masyarakat di suatu daerah tergantung dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Desa Sukorejo untuk mewujudkan masyarakatnya sejahtera adil dan makmur tentu saja juga melakukan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan melalui sektor ekonomi dan sosial maupun pembangunan infrastruktur.



Untuk itu dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari

a. Keterlibatan dalam sumbangan pemikiran

Musrenbangdes di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan di hadiri oleh perwakilan warga, demikian diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom di bawah ini:

“Setiap adanya Musrenbangdes, selalu ada warga perwakilan dari RT 01-40, yang tersebar di seluruh RW dari RW 01-08. Musrenbangdes diadakan. Musrenbangdes diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Dan memberikan peran serta yang baik” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



Gambar 4.1

Wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro



Hal ini dibenarkan oleh seorang warga bernama Ulya Lutfiana yang mengatakan sebagai berikut:

“Setiap tahun ada Musrenbangdes, dan ada perwakilan warga yang terlibat di dalam Musrenbangdes.” (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 07/ RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015)

Keterlibatan warga di Musrenbangdes adalah untuk membuat perencanaan pembangunan di lingkungan masing-masing yang nantinya juga akan dirumuskan di dalam APBDes, sehingga warga juga dilibatkan untuk membuat anggaran pembangunan. Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom di bawah ini:

“Dari masing-masing perwakilan warga yang datang memberikan usulan tentang rencana kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Rencana pembangunan itu bisa berupa infrastruktur dan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, pertanian serta ekonomi.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

DESA SUKOREJO  
1726 / 2015  
/ S. J. A. N. M. A. /  
2015  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2015

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa		-	
1.1.1.2	.....		-	
1.1.2	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa		165,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kas Desa		-	
1.1.2.2	Pasar Desa		-	
1.1.2.3	Pasar Hewan		-	
1.1.2.4	Tambahan Perahu		-	
1.1.2.5	Bangunan Desa		-	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa		-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa :		-	
1.1.2.7.1	.....		-	
1.1.2.7.2	.....		-	
1.1.3	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	.....		-	
1.1.4	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	.....		-	
1.1.5	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.5.1	Leges Administrasi		2,500,000	
1.1.5.2	Hasil Tukar Menukar Tanah Kas Desa		-	
1.2	<b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten</b>		91,000,100	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten		-	
1.2.2	Bagi hasil PBB		-	
1.2.3	.....		-	
1.3	<b>Bagi Hasil Retribusi Kabupaten</b>		13,175,900	
1.3.1	Bantuan dan bagi hasil Retribusi Daerah		-	
1.4	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan</b>		1,182,677,500	
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tahun 2015		-	
1.4.2	.....		-	
1.5	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Desa lainnya</b>			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		25,646,500	
1.5.1.1	Bantuan keuangan dari APBN		-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		-	
1.5.2.1	.....		-	

Gambar 4.2

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Yang menjadi panitia pembangunan di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro adalah Aparatut Desa dan perwakilan masyarakat Desa Sukorejo.

Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom mengungkapkan sebagai berikut:

“Panitia pembanguanan dibentuk dengan unsur aparat desa dan perwakilan masyarakat. Yang mana Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa menjadi Penanggung jawab kegiatan Pembangunan.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

Adanya kepanitiaan khusus Pembangunan juga dibenarkan oleh salah seorang warga bernama HJ. Maslamatun yang mengatakan bahwa:



“Panitia Pembangunan dibentuk khusus, dan sebagai penanggung jawabnya adalah aparatur desa.” (hasil wawancara dengan seorang warga RT 3/RW 1 bernama HJ. Maslamatun, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 03/RW.01, pada tanggal 23 Februari 2015)



**Gambar 4.3**

**Wawancara Dengan Ibu HJ. Maslamatun**

Diperkuat juga oleh pernyataan Ulya Lutfiana sebagai berikut:

“Dalam setiap pembangunan di Desa Sukorejo, dibentuk panitia khusus dan Ketua Panitianya dipilih dari Aparatur Desa (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 07/RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015)

Sumbangsih pemikiran oleh masyarakat diberikan melalui Ketua RT di dalam setiap pembahasan kegiatan pembangunan, hal ini diungkapkan dengan jelas oleh Ulya Lutfiana sebagai berikut:

“Peran masyarakat dalam pembangunan di Desak Sukorejo bisa berupa sumbangsih pemikiran Perencanaan Pembangunan, yang bisa disalurkan melalui Ketua RT masing-masing dan dengan melalui forum-forum yang ada di lingkungan masing-masing baik itu pengajian maupun rapat-rapat RT. Dirinya sendiri melalui pertemuan RT pernah memberikan usulan



terkait pembangunan gorong-gorong. (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 07/ RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015).



**Gambar 4.4**

**Forum Rembug Warga dalam Rangka Partisipasi dalam Pembangunan Desa**

Kusmiyati juga berpendapat yang sama dengan Ulya Lutfiana bahwa:

“Masyarakat bisa saja memberikan sumbangsih pemikiran mas dalam perencanaan pembangunan, biasanya melalui pengajian-pengajian RT mas usulan tersebut dimasukkan.” (hasil wawancara dengan seorang warga Kusmiyati, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 02/ RW.01, pada tanggal 23 Februari 2015).

Dipertegas lagi oleh Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom mengungkapkan bahwa:

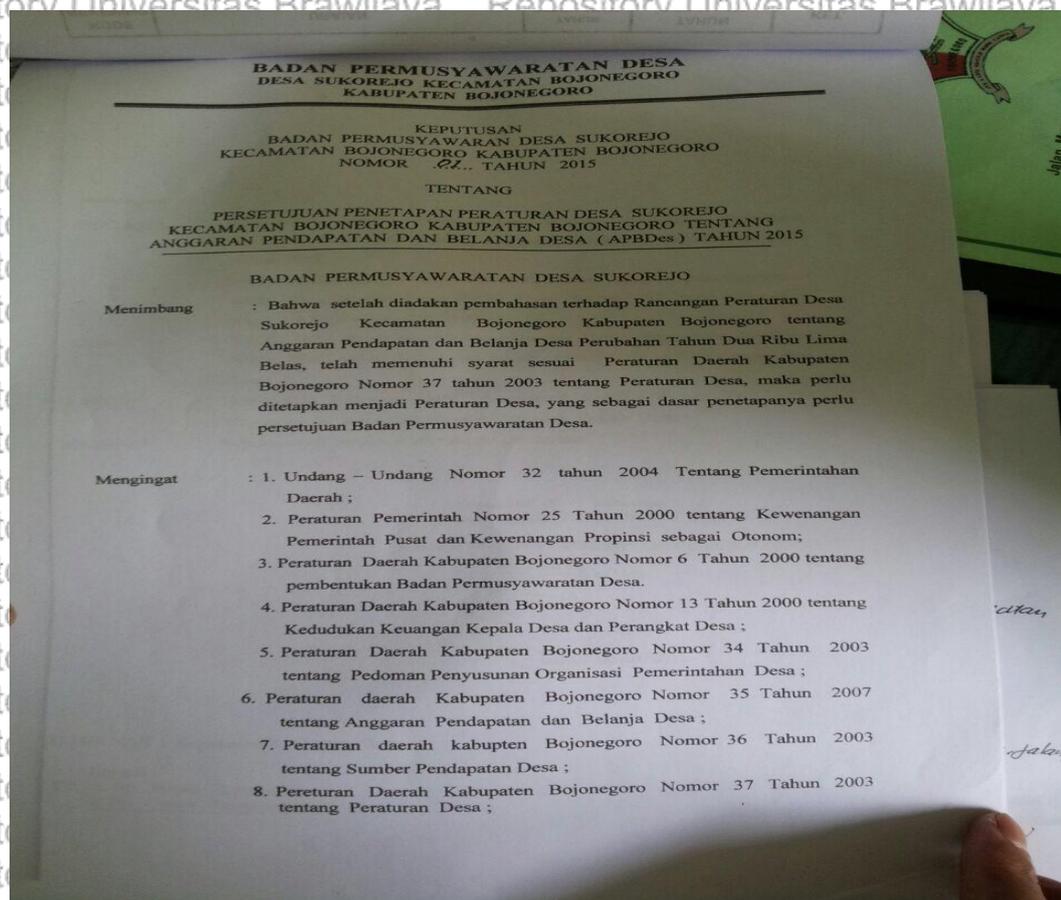
“Masyarakat bisa memberikan usulan perencanaan pembangunan melalui forum-forum RT disana mereka bisa membuat skala prioritas dalam pembangunan, semisal saluran air dan pemavingan jalan. Hasil dari forum-forum warga yang ada di RT disampaikan kepada aparat desa oleh Ketua RT”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



b. Keterlibatan dalam sumbangan materi, barang dan dana

Pengaturan APBDes dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukorejo tergantung dari kebutuhan masing-masing lingkungan. APBDes diperoleh dari Pajak dan Retribusi Desa, ADD, APBN, dan Kas Desa. Penyusunan APBDes dilakukan pada saat Musrenbangdes, di dalam Musrenbangdes juga ditentukan besaran sumbangan masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom mengungkapkan sebagai berikut

“APBDes diatur berdasarkan kebutuhan masing-masing RT. Pembiayaan di dalam APBDes berasal dari Pajak dan Retribusi Desa, ADD, APBN, dan Kas Desa. Total APBDes 2015 di Desa Sukorejo adalah 1.500.000.000,-. Penyusunan APBDes dilakukan pada saat Musrenbangdes, di dalam Musrenbangdes juga ditentukan besaran sumbangan masyarakat. Kemudian RAPBDes itu dibuatkan Peraturan Desa dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



**Gambar 4.5**

**Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tentang APBDes**

Sementara itu Ulya Lutfiana berpendapat sebagai berikut:

“APBDes pengaturannya diperuntukkan dengan baik untuk pembangunan yang ada di Desa Sukorejo dan dilihat dari kebutuhan masing-masing RT. APBDes berasal dari Kas Desa dan ADD (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang beralamatkan di Jl. Brigien Sutoyo RT. 07/RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015).



**Gambar 4.6**  
**Wawancara dengan Ulya Littfiana**

Di Desa Sukorejo, di dalam pembangunan dimungkinkan warga menyumbang secara materi. Hal itu dikatakan oleh Ulya Lutfiana sebagai berikut:

“Seperti pada Pembangunan Masjid Desa Sukorejo, masyarakat bisa menyumbang secara materi dan dana dalam pembangunan tersebut, walaupun pembangunan masjid Desa Sukorejo tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes. Saya menyumbang Dana untuk Pembangunan Masjid, hal itu dipergunakan untuk membeli tanah yang akan dijadikan masjid” (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 07/ RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015).

Namun untuk sumbangan dana menurut Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom diungkapkan sebagai berikut:

“Sumbangan dari masyarakat sebagian besar berupa tenaga, untuk sumbangan dalam bentuk Dana nilai nominalnya masih kecil selama adanya pembangunan di Desa Sukorejo.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



Sementara itu di tahun 2015 ini ada sumbangan dari warga Desa Sukorejo berupa barang (materi) menurut Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom, namun sumbangan berupa barang tersebut belum berani mencantumkan menunggu perubahan APBDDes 2015. Selengkapnya Pernyataan dari Sekretaris Desa Sukorejo Drs. Muhtarom sebagai berikut:

“Masyarakat ada yang menyumbang barang di dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukorejo pada tahun 2015 ini, namun masih belum berani mencantumkan sumbangan tersebut ke APBDDes 2015, menunggu APBDDes perubahan.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

“Wujud sumbangan barang biasanya berupa semen.” Begitu menurut Ulya Lutfiana. Ditambahkan oleh Ulya, “Semen tersebut dipergunakan untuk pembangunan Masjid, walaupun sampai hari ini Pembangunan Masjid Desa Sukorejo tersbut belum slesai.” Ulya sendiri memilih menyumbangkan Dana ketika pembangunan Masjid Desa. (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 07/ RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015).

Pada pengelolaan bantuan masyarakat Sekretaris Desa Sukorejo mengatakan bahwa:

“Masyarakat dapat mengetahui pengelolaan bantuan masyarakat untuk pembangunan. Penyampaian pengelolaan bantuan masyarakat dilakukan pada saat realisasi pembangunan.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

Hal itu dibenarkan oleh Ulya Lutfiana, yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Bantuan masyarakat diatur melalui Ketua RT Masyarakat bisa mengetahuinya melalui Forum-forum pengajian mingguan, Rapat RT. (hasil wawancara dengan seorang warga Ulya Lutfiana, yang



beralamatkan di Jl. Brigjen Sutoyo RT. 07/ RW.02, pada tanggal 23 Februari 2015).

c. Pemanfaatan Pembangunan

Hasil Pembangunan dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sukorejo, salah satu bentuk pembangunan di Desa Sukorejo adalah pemavingan jalan dan Pembangunan saluran air, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo sebagai berikut:

“Manfaat Pembangunan sangat dirasakan oleh Masyarakat terutama Pembangunan Fisik di Desa Sukorejo, seperti pembangunan pemavingan jalan dan saluran air, hasil itu bisa dirasakan oleh warga masyarakat dan lingkungannya.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

“Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan”, demikian ditambahkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor)

“Masyarakat berhak untuk mengawasi dan memelihara secara langsung pembangunan yang ada di Desa Sukorejo, demikian diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo. Mereka bisa menggunakan Forum-forum yang ada di RT masing-masing untuk melaporkan temuan-temuan mereka dalam pembangunan. Laporan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis” demikian diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

Menurut Sekretaris Desa Sukorejo, ada 2 (dua) tahapan dalam Pelaporan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat yaitu:

1. Melalui skala prioritas;
2. Setelah terealisasi pembangunan tersebut.



Dilakukan juga monitoring dari pihak Desa, Kecamatan dan BPD, demikian diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sukorejo. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015).

Selama ini dalam rentang waktu 2012-2015 di Desa Sukorejo tidak ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Drs. Muhtarom Sekretaris Desa Sukorejo, bahwa:

“Masyarakat sangat kooperatif dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga tidak ada kendala baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukorejo. Jika ada kendala, maka akan segera ditindaklanjuti” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki

Drs. Muhtarom Sekretaris Desa Sukorejo, mengatakan bahwa

“Selama ini rasa tanggung jawab masyarakat sangat tinggi sekali terhadap hasil-hasil pembangunan, mereka secara aktif terlibat pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum dan sosial yang ada di Desa Sukorejo serta pemeliharaan asset-aset desa.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)

## 2. Wujud Pembangunan Fisik Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Wujud dari Pembangunan Desa Sukorejo bisa dilihat dari pavingisasi dan pembuatan saluran air, hal itu dinyatakan oleh Sekretaris Desa Sukorejo, sebagai berikut:

“Wujud Pembangunan Desa Sukorejo selama ini adalah pembangunan Fisik, dan di tahun 2014 dan 2015 ini pembangunan Fisik tersebut berupa pavingisasi jalan dan pembangunan saluran air (drainase).” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



a. Pembangunan Gorong-gorong (Saluran Air)

“Pembangunan Gorong Saluran Air merupakan kegiatan yang cukup positif, karena warga dengan guyub rukunnya bergotong royong selain mereka berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga mereka, warga ada juga yang berpartisipasi dengan menyumbangkan semen maupun ada sejumlah uang. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



**Gambar 4.7**

**Pembangunan Gorong-gorong (Saluran Air)**

b. Pembangunan Jalan Setapak (Pavingisasi)

“Demikian juga dengan Pembangunan jalan setapak, mereka bergiliran melakukan kerja bakti, bergotong royong membangun jalan setapak di sepanjang Desa Sukorejo, yang pembagian kerjanya itu berdasarkan RW dan RT masing-masing.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo, Tanggal 23 Februari 2015)



**Gambar 4.8**

**Pembangunan Jalan Setapak (Pavingisasi)**

### C. Analisis Pembahasan

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari

a. Keterlibatan dalam sumbangan pemikiran

Pelibatan masyarakat di Desa Sukorejo pada waktu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Yang

Menurut Adisasmita (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai

keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi

kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program

pembangunan. Dan juga Adisasmita (2006) mengatakan peningkatan partisipasi

masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social*

*empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan



yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Aspek masukan atau *input* (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan)
- c. Aspek keluar atau *output* (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi)

Dikaitkan juga dengan pendapat Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan

Maka pelibatan masyarakat di Desa Sukorejo pada aras Pembangunan masuk ke dalam tahapan yang dikemukakan oleh Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) merupakan proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Dan arah dari pelibatan masyarakat ke dalam aras pembangunan merupakan bentuk pelaksanaan dari pernyataan Conyers (1994:154) adalah

1. sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat



2. masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.

3. timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Pelibatan masyarakat dalam aras pembangunan di Desa Sukorejo menurut penulis dapat mengukur sejauh mana kebijakan Pemerintah Desa Sukorejo dapat didukung oleh masyarakat. Sehingga Pembangunan di Desa Sukorejo memiliki manfaat, manfaat yang menurut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. Dijelaskan oleh Santosa dan Heroepoetri (2005:5), sebagai berikut:

“Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.”

b. Keterlibatan dalam sumbangan materi, barang dan dana

Sumbangan masyarakat Desa Sukorejo dalam bentuk barang dan dana pada pembangunan perlu diapresiasi, menandakan pengorbanan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka sendiri. Hal tersebut merupakan bentuk keterlibatan mereka dalam memikul beban kegiatan pembangunan agar pembangunan yang ada menjadi lancar untuk menuju kemakmuran bersama. Serta merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini berupa masukan *input* dana dan sarana. Yang menurut Adisasmita (2006) masuk ke dalam Aspek masukan atau *input*. Dan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan



pembangunan dengan mereka memberikan sumbangan baik dana, tenaga maupun materi. Ditinjau dari yang dikemukakan oleh Conyers (1994:154) yaitu masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.

Hal ini menimbulkan sisi positif dari partisipasi, sehingga demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pentingnya partisipasi menurut Tjokrowinoto (2002: 48), adalah sebagai berikut:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tetap terungkap.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi merupakan *game zone* (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan.
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.



i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan has daerah.

j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Ada beberapa bentuk partisipasi menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1988:16), meliputi:

1. konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa;
2. sumbangan spontan berupa uang dan barang;
3. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga;
4. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat;
5. sumbangan dalam bentuk kerja;
6. aksi massa;
7. mengadakan pembangunan di kalangan keluarga; dan
8. membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Sumbangan dana, tenaga dan barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo merupakan sumbangan spontan dan sumbangan dalam bentuk kerja dari bentuk partisipasi menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1988:16).



### c. Pemanfaatan Pembangunan

Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan pada pemavingan jalan dan pembangunan saluran air menurut Santosa dan Herøpoetri (2005:5) adalah merupakan manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu:

#### 1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill, 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

#### 2. Meningkatkan proses belajar

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

### d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor)

Kesempatan yang dimiliki oleh anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan pembangunan di Desa Sukorejo diatas, ditinjau dari yang dikemukakan oleh Adisasmita (2006) terkait Pemberdayaan Masyarakat upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien dalam aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan).

Terlihat jelas bagaimana warga masyarakat secara aktif bisa melaporkan temuan-



temuan mereka dalam proses pembangunan di Desa Sukorejo melalui rapat-rapat RT maupun Forum-forum Pengajian Mingguan.

Sehingga dengan adanya pengawasan ketimpangan-ketimpangan yang mungkin bisa timbul dari pelaksanaan hasil pembangunan bisa diminimalisir.

Karena bagaimanapun penikmat dari hasil-hasil pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga dibutuhkan kesadaran untuk melakukan pengawasan pembangunan.

Pengawasan Pembangunan oleh masyarakat Desa Sukorejo menurut penulis juga mengeliminir perasaan terasing, karena turut aktifnya berpartisipasi dalam pembangunan, masyarakat desa Sukorejo tidak akan merasa terasing.

Karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan Santosa dan Heroepoetri (2005:5) tentang manfaat dari pembangunan yang salah satunya adalah mengeliminir perasaan terasing.

e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki

Rasa tanggung jawab untuk memelihara hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo adalah bagian integral yang harus dipertahankan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal itu mengacu dari pernyataan Tjokroamidjojo (2002) yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab.



Maka bisa dikatakan bahwa dengan timbulnya rasa tanggung jawab masyarakat Desa Sukorejo, akan berbanding lurus dengan rasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang ada. Kesadaran akan pentingnya pemeliharaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan.

## 2. Wujud Pembangunan Fisik Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Wujud Pembangunan Desa Sukorejo selama ini adalah pembangunan Fisik. Pembangunan Fisik tersebut sesuai dengan kemauan dan kebutuhan masyarakat di Desa Sukorejo. Maka Proses pembangunan fisik berupa pavingisasi dan pembangunan saluran air merupakan keberhasilan dari perencanaan program berdasarkan kebutuhan. Jika ditinjau dari Cahyono (2006:1), proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat sudah berdasarkan fakta dan kenyataan. Menurut Cahyono (2006:1) proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- (1) Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat,
- (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya,
- (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat,
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program



(5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada

(6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang,

(7) Memberi kemudahan untuk evaluasi,

(8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

a. Pembangunan Gorong-gorong Saluran Air (Drainase)

Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan gorong-gorong saluran air yang dilakukan dengan guyub rukun maka hal ini mematahkan teori problematika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Solekhan (2014: 157) dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1)

Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat, dan 2) Melemahnya Modal Sosial.

Karena menurut Penulis untuk kajian hal yang pertama, di desa Sukorejo Ruang Partisipasi masyarakat terbuka lebar, mereka bisa terlibat di dalam pembangunan mulai dari perencanaan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasan secara langsung. Dalam konteks melemahnya modal sosial, hal ini tidak terbukti karena guyub rukunnya masyarakat Desa Sukorejo itu merupakan modal sosial yang bagus untuk kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sukorejo.

b. Pembangunan Pavingisasi Jalan

Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta di dalam pembangunan pavingisasi jalan membuktikan bahwa telah tercapainya program pembangunan dan sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Cahyono (2006), yaitu terkait

Partisipasi Masyarakat dan Program pembangunan pavingisasi jalan tersebut sudah memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan di BAB sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, bisa dilihat dari tahap perencanaan yang mana pada tahap ini masyarakat Desa Sukorejo terlibat dalam perencanaan melalui forum-forum tingkat RT dan pengajian mingguan, dilihat dari proses pelaksanaan adanya kerelaan masyarakat dalam menyumbang baik dana, materi maupun tenaga dalam pembangunan, maupun bisa dilihat dari keberanian mereka melaporkan ketimpangan-ketimpangan yang itu merupakan bentuk pengawasan
2. Perwujudan dari Pembangunan Desa Sukorejo tersebut berupa pembangunan Fisik yaitu:
  - a. Pembangunan Pavingisasi Jalan
  - b. Pembangunan Saluran Air



## B. Saran

Saran yang bisa penulis berikan dari penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sikap pro aktif masyarakat, Desa Sukorejo secara keseluruhan dalam pembangunan di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, jika Pemerintah Desa belum ada jadwal untuk mengajak masyarakat bergotong royong membangun Desa, setidaknya saya akan mengajak beberapa masyarakat untuk bergotong royong bekerja bakti menjaga kebersihan lingkungan Desa, dan semoga bisa menimbulkan kesadaran masyarakat yang lain untuk ikut andil dalam hal ini, sehingga bisa menumbuhkan sikap pro aktif masyarakat dalam pembangunan Deasa Sukorejo, Kecamatan Bjonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

2. Hendaknya pihak Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mementingkan pembangunan fisik saja dalam melakukan aktivitas pembangunan, melainkan juga pembangunan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya melalui kegiatan-kegiatan perekonomian dan bergotong royong sehingga mereka mampu menuju kemakmuran dan kesejahteraan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono.2001. Teori Dan Isu Pembangunan. Malang, UM Press.
- B.Hestu Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta. Universitas. Atma Jaya.
- Bayu Surianingrat. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta. Aksara Baru.
- Bintoro Tjokroaminoto. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dadang Juliantara. 2004. *Pembaharuan Kabupaten*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Diana Coyers, 1994, *Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Kota*, Terjemahan Puji Lestari, Dwi Mayangsari, dan Sely Martini, Bandung, Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- <http://arepril.blogspot.com/2013/09/pengertian-pembangunan-masyarakat-desa.html>, Diakses 5 desember 2014
- Imam Hanafi dan Tri Laksono Mugroho. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Irawan Soedjito, 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Kristiadi, J., 1994. *Administrasi Manajemen Pembangunan*, Jakarta: LAN RI
- M. A Santosa dan Arimbi Heroepoetri. 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta. WALHI
- Moeljarto Tjokrowinoto, 2002, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Moleong, 1999. *Ilmu Administrasi*. Bandung: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: ALFABETA.
- Panudju Bambang, (1999), *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung.



Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta. Graha Ilmu

Santoso Satropoetro, 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang. Setara Press

Syafi'i, HM. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Perspektif Teoritik

SP. Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta. Bina Aksara

Sinambela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika Offset

Sumarwan. 2003. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syafie. 1999. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pertija.

Taliziduhu Ndraha. 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara

----- 1982. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.

Tjandra P. Riawan. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.

Tjiptono. 2006. *Strategi Pemasaran (Edisi III)*. Jogjakarta. Andi Sekaran.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV. Fokus Media

Weber. 1978. *Bureaucracy: Essay in Sociology*. London: Oxford University Press.

Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga



## PEDOMAN WAWANCARA

### Questioner untuk Aparatur Desa

NAMA .....

Jabatan .....

Umur .....

Alamat .....

Tanggal Interview .....

Jam .....

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari

a. Keterlibatan dalam aras pembangunan (sumbangan pemikiran)

1) Tiap berapa tahun diadakan Musrenbang di Desa Sukorejo?

2) Apakah ada panitia khusus di dalam pembangunan di Desa Sukorejo? Jikalau ada, bagaimana biasanya susunan panitia pembangunan di Desa Sukorejo, siapakah yang menjadi ketua pembangunan tersebut, masyarakat ataukah aparatur Desa? Apakah komposisi kepanitiaan sudah mencerminkan inklusifitas Gender dan kelompok-kelompok yang ada di desa Sukorejo?

3) Sejauh ini bagaimanakah peran masyarakat Desa Sukorejo dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan Di Desa Sukorejo?

4) Apakah masyakat dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada saat perencanaan Pembangunan di Desa Sukorejo?



5) Dalam perencanaan bagaimanakah mekanisme pemberian sumbangsih pemikiran masyarakat dalam pembangunan? Apakah disediakan forum-forum khusus untuk melihat sejauh mana sumbangsih pemikiran masyarakat di dalam Pembangunan di Desa Sukorejo ataukah bisa melalui angket?

b) Memikul beban kegiatan pembangunan (sumbangan materi, barang dan dana)

1) Bagaimanakah pengaturan APBDes dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukorejo? Apakah Anda mengetahui berapakah Alokasi dana pembangunan di Desa Sukorejo pada Tahun 2013-2015? Berasal darimanakah pembiayaan pembangunan di Desa Sukorejo?

2) Adakah aturan di Desa Sukorejo terkait sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan?

3) Apakah dimungkinkan sumbangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Sukorejo berupa sumbangan materi, barang dan dana?

4) Bagaimanakah wujud sumbangan materi dari warga biasanya? Mengapa mereka memilih sumbangan materi?

5) Bagaimanakah wujud sumbangan barang dari warga dalam partisipasinya pada pembangunan di Desa Sukorejo? Mengapa mereka memilih sumbangan barang?

6) Adakah nilai minimal di dalam sumbangan dana bagi setiap warga masyarakat desa Sukorejo yang ingin disumbangkan di dalam pembangunan di desa Sukorejo? Mengapa mereka memilih sumbangan Dana?

7) Bagaimanakah pengelolaan sumbangan masyarakat di desa Sukorejo?

8) Apakah Masyarakat mengetahui jumlah sumbangan yang telah dikumpulkan?



9) Bagaimakah cara masyarakat mengetahuinya?

c. Pemanfaatan Pembangunan

1) Bagaimanakah sejauh ini manfaat pembangunan di Desa Sukorejo yang dirasakan masyarakat?

2) Dalam bentuk apa pemanfaatan Pembangunan di Desa Sukorejo?

3) Apakah masyarakat dilibatkan secara langsung di dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan?

4) Apakah menurut Anda Pribadi Pembangunan di Desa Sukorejo bermanfaat? Berikan alasannya?

d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor)

1) Bagaimanakah model pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Sukorejo?

2) Apakah ada forum pengaduan di Desa Sukorejo terkait dengan adanya pengawasan dari masyarakat? Jikalau ada forum-forum apakah yang dipakai oleh masyarakat di dalam melakukan pengaduan hasil dari pengawasan?

3) Bagaimanakah bentuk pelaporan Pembangunan di Desa Sukorejo selama ini??

4) Apakah masyarakat dilibatkan di dalam pelaporan Pembangunan?

5) Bagaimakah bentuk pelibatan masyarakat di dalam pelaporan Pembangunan?

6) Dalam 1 tahun, berapa kali dilakukan pelaporan pembangunan kepada masyarakat?

7) Adakah kendala di dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2012, 2013, dan 2014?



8) Bagaimanakah penyelesaian kendala-kendala Pembangunan di Tahun 2012, 2013, dan 2014?

e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki

1) Bagaimanakah rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan selama ini?

2) Dalam bentuk apa tanggung jawab pembangunan Fisik dan Non Fisik yang dilakukan oleh masyarakat?

2. Wujud Pembangunan Desa

1) Bagaimanakah wujud Pembangunan Fisik Di Desa Sukorejo?

2) Bagaimanakah wujud Pembangunan Non Fisik di Desa Sukorejo?

3) Lebih besar manakah pembangunan fisik atau pembangunan non fisik di Desa Sukorejo, untuk tahun 2012, 2013, 2014



## Questioner untuk Masyarakat

Nama .....

Pekerjaan .....

Umur .....

Alamat .....

Tanggal Interview: .....

Jam .....

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro,

Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari

a. Keterlibatan dalam aras pembangunan (sumbangan pemikiran)

1) Tiap berapa tahun diadakan Musrenbang di Desa Sukorejo?

2) Apakah ada panitia khusus di dalam pembangunan di Desa Sukorejo? Jikalau ada, bagaimana biasanya susunan panitia pembangunan di Desa Sukorejo, siapakah yang menjadi ketua pembangunan tersebut, masyarakat ataukah aparatur Desa? Apakah komposisi kepanitiaan sudah mencerminkan inklusifitas Gender dan kelompok-kelompok yang ada di desa Sukorejo?

3) Sejauh ini bagaimanakah peran masyarakat Desa Sukorejo dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan Di Desa Sukorejo?

4) Apakah masyakat dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada saat perencanaan Pembangunan di Desa Sukorejo?

5) Dalam perencanaan bagaimanakah mekanisme pemberian sumbangsih pemikiran masyarakat dalam pembangunan? Apakah disediakan forum-forum khusus untuk



melihat sejauh mana sumbangsih pemikiran masyarakat di dalam Pembangunan di Desa Sukorejo ataukah bisa melalui angket?

6) Apakah Anda pernah memberikan sumbangsih pemikiran di Desa Sukorejo? Kapan dan bagaimanakah cara Anda memberikan sumbangsih pemikiran? Sumbangsih pemikiran apakah yang pernah Anda berikan?

b. Memikul beban kegiatan pembangunan (sumbangan materi, barang dan dana)

1) Bagaimanakah pengaturan APBDes dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukorejo? Berapakah Alokasi dana pembangunan di Desa Sukorejo pada Tahun 2013-2015? Berasal darimanakah pembiayaan pembangunan di Desa Sukorejo?

2) Adakah aturan di Desa Sukorejo terkait sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan?

3) Apakah dimungkinkan sumbangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Sukorejo berupa sumbangan materi, barang dan dana?

4) Bagaimanakah wujud sumbangan materi dari warga biasanya? Mengapa mereka memilih sumbangan materi?

5) Bagaimanakah wujud sumbangan barang dari warga dalam partisipasinya pada pembangunan di Desa Sukorejo? Mengapa mereka memilih sumbangan barang?

6) Adakah nilai minimal di dalam sumbangan dana bagi setiap warga masyarakat desa Sukorejo yang ingin disumbangkan di dalam pembangunan di desa Sukorejo? Mengapa mereka memilih sumbangan Dana?

7) Apakah sumbangan yang pernah Anda berikan di dalam pembangunan di Desa Sukorejo dalam bentuk dana, materi ataupun barang? Kapan? Dan diserahkan kepada siapa sumbangan tersebut?



8) Bagaimanakah pengelolaan sumbangan masyarakat di desa Sukorejo?

9) Apakah Masyarakat mengetahui jumlah sumbangan yang telah dikumpulkan?

10) Bagaimakah cara masyarakat mengetahuinya?

11) Anda sendiri memilih menyumbang apakah di dalam pembangunan di Desa Sukorejo? Mengapa Anda memilih hal tersebut?

#### c. Pemanfaatan Pembangunan

1) Bagaimanakah sejauh ini manfaat pembangunan di Desa Sukorejo yang dirasakan masyarakat?

2) Dalam bentuk apa pemanfaatan Pembangunan di Desa Sukorejo?

3) Apakah masyarakat dilibatkan secara langsung di dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan?

4) Bagaimanakah cara Anda memanfaatkan hasil-hasil pembangunan di Desa Sukorejo?

5) Apakah menurut Anda Pribadi Pembangunan di Desa Sukorejo bermanfaat? Berikan alasannya?

#### d. Pengawasan Pembangunan (bersedia melapor)

1) Bagaimanakah model pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Sukorejo?

2) Apakah ada forum pengaduan di Desa Sukorejo terkait dengan adanya pengawasan dari masyarakat? Jikalau ada forum-forum apakah yang dipakai oleh masyarakat di dalam melakukan pengaduan hasil dari pengawasan?

3) Apakah Anda pernah melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Desa Sukorejo, bagaimanakah bentuk pengawasan yang Anda lakukan?



4) Bagaimanakah bentuk pelaporan Pembangunan di Desa Sukorejo selama ini?

5) Apakah masyarakat dilibatkan di dalam pelaporan Pembangunan?

6) Bagaimakah bentuk pelibatan masyarakat di dalam pelaporan Pembangunan?

7) Dalam 1 tahun, berapa kali dilakukan pelaporan pembangunan kepada masyarakat?

8) Apakah Anda terlibat secara langsung di dalam Pelaporan pembangunan di Desa Sukorejo?

9) Adakah kendala di dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2012, 2013, dan 2014?

10) Bagaimanakah penyelesaian kendala-kendala Pembangunan di Tahun 2012, 2013, dan 2014?

e. Rasa Tanggung jawab/ memiliki

1) Bagaimanakah rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan selama ini?

2) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Anda terhadap hasil-hasil pembangunan di Desa Sukorejo, baik terhadap hasil pembangunan fisik maupun non fisik

2. Wujud Pembangunan Desa

1) Bagaimanakah wujud Pembangunan Fisik Di Desa Sukorejo?

2) Bagaimanakah wujud Pembangunan Non Fisik di Desa Sukorejo?

3) Lebih besar manakah pembangunan fisik atau pembangunan non fisik di Desa Sukorejo, untuk tahun 2012, 2013, 2014?



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN BOJONEGORO**  
**KEPALA DESA SUKOREJO**

Jalan Munginsidi No. 152 Telp. (0353) 887775

**SURAT-KETERANGAN**

Nomor : 474 / 509 / 35.22.15.2003 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama Lengkap : **HM. BUDI SUPRAYITNO**  
b. Jabatan : Kepala Desa Sukorejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **FATONI HASAN**  
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25-08-1987  
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Pekerjaan : Pelajar  
A g a m a : Islam  
Alamat : Jl. Brigiend Sutoyo RT. 09 / RW. 03  
Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro

Menerangkan bahwa orang tersebut di atas benar – benar telah menyelesaikan riset / survey di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dengan tema Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ( Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro ) mulai tanggal 23 Pebruari s.d. 23 Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar- benarnya dan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 22 Juli 2015  
Kepala Desa Sukorejo

  
**HM.BUDI SUPRAYITNO**

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Fatoni Hasan  
NIM : 0810313048  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Agustus 1987  
Alamat : Jl. Brigjen Sutoyo No 73, Desa Sukorejo  
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NO. HP : 081335144422  
E-mail : [fatonihasan1987@gmail.com](mailto:fatonihasan1987@gmail.com)

### Pendidikan Formal

1994-2000 : MIN Kepatihan, Bojonegoro, Jawa Timur  
2000-2002 : Diniyah Islamiyah Senori, Tuban, Jawa Timur  
2002-2005 : MTs Senori, Tuban, Jawa Timur  
2005-2008 : MAN Denanyar, Jombang, Jawa Timur  
2008-2015 : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang,  
Jawa Timur

